

BAB IV

KERJASAMA ANTARA WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF) DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN MELALUI PROGRAM LAMA-I

Penjabaran mengenai pentingnya mitigasi bencana serta upaya bersama yang dilakukan World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dibahas di Bab IV yang juga merupakan bab inti dari skripsi ini. Setelah penjabaran mengenai Keterlibatan World Agroforestry Centre dan Problem Lingkungan di Sumatera Selatan, bab ini akan dijabarkan untuk menganalisa upaya yang telah dilakukan World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Pemerintah Sumatera Selatan dalam penanganan perubahan iklim.

A. Mitigasi Bencana di Provinsi Sumatera Selatan

Krisis lingkungan yang terjadi di Sumatra Selatan belakangan ini menunjukkan mitigasi bencana perlu untuk menanggulangi kerusakan dan juga bencana yang kerap terjadi. Mitigasi sendiri mengandung pengertian serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Undang-undang no 24 tahun 2007, 2007)

Krisis bencana yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia. Namun mitigasi bencana nampaknya sulit dilakukan karena mitigasi belum menjadi kesadaran masyarakat meskipun mereka sadar bahwa mereka tinggal di lingkungan rawan bencana. Masyarakat Indonesia cenderung pasrah mengenai apa saja yang terjadi meskipun bencana yang kerap terjadi tersebut karena ulah mereka sendiri. Padahal sangatlah mungkin apabila mereka memahami bahwa mitigasi dapat dilakukan berbarengan dengan pemenuhan kebutuhan maka resiko bencana akan menurun. Maka inilah tantangan dari upaya mitigasi itu sendiri.

Mitigasi bencana nyatanya belum menjadi budaya dan kesadaran masyarakat Indonesia. Contohnya, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) selalu memberikan informasi mengenai perkiraan cuaca. Apabila perkiraan cuaca hujan, baiknya masyarakat mempersiapkan diri atau bahkan jika mungkin tidak bepergian keluar rumah. Tetapi masyarakat cenderung memiliki sifat acuh tak acuh dan pasrah terhadap resiko bencana yang terjadi. Mereka tidak memanfaatkan informasi yang telah disediakan BMKG tersebut dengan sikap yang benar. Selain itu, banyak masyarakat yang pasif dan tidak tangguh pada situasi pasca bencana. Ini dapat dikarenakan masyarakat yang mendapatkan bencana terbiasa mendapatkan bantuan dan santunan pemerintah dan swasta. (Dyah, 2016)

Penanggulangan bencana sendiri memiliki tujuan yang amat penting yakni, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selanjutnya, penanggulangan bencana ini dapat mendorong semangat bergotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. (Undang-undang no 24 tahun 2007, 2007) Tujuan yang paling penting yakni memberikan perlindungan dari ancaman bencana adalah tujuan yang seharusnya disadari masyarakat karena pada dasarnya tidak ada siapapun di dunia ingin yang didera bencana..

Peran serta partisipasi kemitraan publik dan swasta juga ditekankan didalam tujuan penanggulangan bencana seperti yang tercantum dalam Undang-undang no 24 tahun 2007. Maksud partisipasi kemitraan publik dan swasta dikarenakan bencana adalah salah satu kejadian dimana berbagai pihak dapat berbagi peran karena pemerintah tentu memiliki keterbatasan. Karenanya, diharapkan semua pihak dapat saling melengkapi dan memberikan solidaritas untuk aksi mitigasi dan yang terpenting disaat bencana terjadi. Kenyataannya, banyak yang pihak yang hanya bergerak saat bencana terjadi atau setelah bencana terjadi saja. Hal ini menunjukkan

bahwa banyak sektor swasta yang kurang aktif dibidang mitigasi. (Disaster Resource Partnership Indonesia, 2014)

B. Kerjasama Penanganan Perubahan Iklim Antara World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Pemerintah Sumatera Selatan Melalui Program LAMA-I

World Agroforestry Centre (Selanjutnya ICRAF) yang juga lembaga swasta bermaksud ikut mengambil peran partisipasi dalam penanggulangan bencana mengingat penanggulangan bencana merupakan salah satu tujuan didirikan ICRAF. Sumatera Selatan memiliki potensi bencana sekaligus potensi menanggulangi bencana di wilayah Sumatera Selatan itu sendiri karena Sumatera Selatan memiliki peran untuk menjadi penyimpan candangan karbon untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan *global warming* yang akan membawa bencana secara global. Karena itu, ICRAF menilai mitigasi yang dilakukan di skala Provinsi itu dapat membawa dampak baik yang besar hingga skala global. (World Agroforestry Centre, 2013)

Resiko banjir dan tanah longsor yang cukup tinggi terjadi di Sumatera Selatan padahal provinsi ini memiliki sumber daya alam yang memungkinkan wilayahnya untuk aman dari bencana-bencana tersebut. Karenanya, ICRAF memberikan advokasi mengenai sistem aplikasi agroforestri sebagai upaya mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor. ICRAF memiliki penelitian mengenai pentingnya peran pohon untuk jasa lingkungan didalam sistem agroforestri. Pohon memiliki peran untuk mengurangi resiko tanah longsor. Selain itu agroforestri ini juga telah terbukti tidak mengganggu produktivitas pertanian.

Mitigasi bencana melalui agroforestri dapat dilakukan tanpa mengorbankan proses pembangunan terlebih mengorbankan kebutuhan masyarakat. Agroforestri sendiri merupakan suatu sistem kebun campur atau populer dengan sebutan *tumpang sari*. Agroforestri ini sebenarnya sudah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia bahkan sebelum sistem Agroforestri

sendiri ditemukan. Agroforestri yang merupakan sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon baik yang sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola petani dalam ekosistem yang menyerupai hutan. Selain beraneka jenis pohon, juga terdapat tanaman musiman dan rerumputan dalam jumlah banyak. Kenampakan fisik dan dinamika didalamnya mirip dengan ekosistem hutan. Oleh karena itu sistem ini disebut *Agroforest*. (De Foresta H, 2000)

Agroforestri tidak lagi asing mengingat masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem ini dengan nama *tumpangsari*. Selain itu, sistem ini dinilai dapat menjadi jawaban atas banyak masalah lingkungan di Indonesia karena berbagai keuntungan yang dapat diberikan dari agroforestri ini. Mulai dari tersedianya pangan dan terjaminnya jasa lingkungan, hingga pengurangan emisi secara signifikan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang digalakkan diseluruh dunia, Agroforestri merupakan salah satu solusi dari upaya pembangunan berkelanjutan ini sendiri. Aplikasi agroforestri sendiri dilakukan untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan serta mengurangi resiko kegagalan dan longsornya tanah karena tutupan tanaman yang beragam.

Pengaplikasian agroforestri di Sumatera Selatan amat mungkin dilakukan karena beberapa faktor. Pertama, lahan gambut dan luas hutan yang dimilikinya. Dua hal ini perlu dijaga kelestariannya untuk tetap menjaga lingkungan dan mencegah dampak perubahan iklim bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Kedua, masyarakat di Sumatera Selatan mengandalkan sektor lahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karenanya, penerapan agroforestri dapat dilakukan oleh masyarakat demi tujuan mitigasi sekaligus pembangunan berkelanjutan.

Upaya mitigasi yang dibarengi pembangunan berbasis sektor lahan di Sumatera Selatan dilakukan oleh ICRAF dan bekerjasama dengan Pemerintah Sumatera Selatan di tiga kabupaten

di Sumatera Selatan. Tiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Tiga kabupaten yang ditunjuk karena berbagai alasan. Pertama, ketiga kabupaten itu merupakan daerah aliran sungai yang menyebabkan daerah tersebut rawan banjir apabila sungai Musi meluap atau pasang. Kedua, ketiga daerah tersebut memiliki tutupan hutan dan lahan gambut yang masih terbilang luas. Ketiga, daerah yang ditunjuk memiliki lahan kritis yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan yang menguntungkan secara ekonomis maupun lingkungan. Faktor tersebut yang melatarbelakangi ketiga kabupaten tersebut dipilih untuk diberikan advokasi peningkatan kapasitas pemerintah mengenai pembangunan rendah emisi untuk tujuan mitigasi atas perubahan iklim. Upaya mitigasi sekaligus pembangunan berbasis sektor lahan yang rendah emisi ini dituangkan kedalam program Locally Appropriate Mitigation Actions in Indonesia (Selanjutnya LAMA – I).

1. Program LAMA - I

Program LAMA – I ini merupakan program ditingkat lokal dari Program Pemerintah yakni NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) yang diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan tujuan mengurangi emisi sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional tanpa mengorbankan pembangunan. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013) LAMA – I merupakan program yang dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk ikut berpartisipasi dalam program nasional dan internasional¹ tentang pembangunan rendah emisi untuk mengurangi laju perubahan iklim.

Emisi perkapita Indonesia kebanyakan berasal dari konversi lahan gambut dan hutan. Hal ini menunjukkan perlunya perubahan dan peninjauan kembali perencanaan pembangunan yang

¹ Hingga saat ini belum ada istilah umum yang disetujui untuk program pengurangan emisi ditingkat Internasional akan tetapi seluruh negara dihimbau memiliki rencana dan upaya untuk menurunkan emisi demi menanggulangi laju perubahan iklim. NAMAs merupakan program nasional Indonesia yang telah disetujui dan diverifikasi oleh UNFCCC dan sejalan dengan rencana pengurangan emisi.

selama ini telah berjalan di Indonesia. Langkah-langkah yang paling mungkin dilakukan adalah pengurangan konversi lahan gambut dan hutan serta tindakan mitigasi lokal berbasis sektor penggunaan lahan. Tiap-tiap daerah telah memiliki peraturan dan rencana penurunan emisi dalam rangka berkontribusi dalam komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi. Rencana tersebut disebut Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (selanjutnya RAD – GRK)². Pelaksanaan RAN – GRK memerlukan sinergi antara rencana pembangunan untuk memenuhi kedua tujuan yakni pengurangan emisi dan target pertumbuhan ekonomi. Sinergi ini juga diperlukan antara ditingkat nasional dan tingkat provinsi agar tujuan RAN – GRK dan RAD – GRK dapat terwujud. Perencanaan tata ruang ditingkat kabupaten perlu mengakomodasi tujuan pengurangan emisi yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan fungsi Daerah Aliran Sungai (selanjutnya DAS), keanekaragaman hayati dan ekosistem dari lingkungan. (World Agroforestry Centre, 2013)

Selain sinergi diantara tingkat nasional dan provinsi diperlukan keselarasan ditingkat kabupaten dengan tingkat provinsi mengenai kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati, jasa lingkungan seperti fungsi DAS, lahan gambut, dan hutan yang memiliki kaitan erat dengan strategi adaptasi perubahan iklim. Demi mencapai hal itu, ICRAF bekerjasama dengan *Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific* (CCROM), *Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit* (GIZ), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang telah memulai proyek LAMA – I. Proyek ini didanai oleh *Danish International Development Agency* (DANIDA) dan berfokus pada pembangunan kapasitas pemerintah daerah

² RAD – GRK merupakan rencana aksi mitigasi lokal yang diadopsi dari rencana mitigasi dengan tujuan penurunan emisi ditingkat nasional dengan nama Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN – GRK)

dalam pengembangan perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik untuk mencapai pembangunan rendah emisi. (World Agroforestry Centre, 2013)

2. Tujuan program LAMA – I

- a.) Memperkuat kapasitas pemerintah daerah kunci³ untuk mengembangkan rencana pembangunan rendah emisi terintegrasi sebagai bagian dari aksi mitigasi di Indonesia yang sesuai. (World Agroforestry Centre, 2013)
- b.) Bekerjasama dengan mitra-mitra, terutama Bappenas dan Bappeda untuk mendukung Indonesia dalam mendiskusikan tindakan mitigasi lokal yang tepat dan menciptakan ekonomi yang hijau. (World Agroforestry Centre, 2013)
- c.) Dengan menerapkan LUMENS⁴ dan melakukan sejumlah tindakan di kabupaten terpilih. LAMA – I diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk instansi pemerintah lokal dan nasional dalam upaya mencapai target pengurangan emisi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara pada saat yang sama melindungi fungsi DAS, keanekaragaman hayati dan ekosistem alami lingkungan. (World Agroforestry Centre, 2013)

Pertanian amat dipengaruhi oleh perubahan iklim, akan tetapi pertanian itu juga dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Kedua hal ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, petani menjadi salah satu pihak yang paling mendapatkan guncangan tinggi ketika laju perubahan iklim begitu drastis. Selain petani, tanaman (dalam hal ini pohon) amat

³ Daerah kunci merupakan daerah yang terpilih dengan kriteria memiliki tutupan hutan dan lahan gambut yang terancam keberadaannya padahal hutan dan lahan gambut yang dimilikinya dapat meredam laju perubahan iklim. Daerah tersebut adalah Provinsi Sumatera Selatan (kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas dan Banyuasin) dan Provinsi Papua (Kabupaten Jayawijaya).

⁴ LUMENS adalah perencanaan penggunaan lahan yang membantu masyarakat di Papua dan Sumatera Selatan mengembangkan zona yang tepat atau unit perencanaan daerah yang sesuai dengan tujuan perencanaan penggunaan lahan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mengukur jasa lingkungan yang diperoleh oleh daerah dan mensimulasikan skenario perubahan penggunaan lahan berdasarkan kondisi lokal yang spesifik.

dipengaruhi oleh variabilitas dan perubahan iklim akan tetapi disisi lain pohon juga dapat mempengaruhi perubahan iklim dengan mengubah proses di atmosfer. Selain mempengaruhi iklim, pohon juga memberikan jasa lingkungan seperti menambah cadangan air dalam tanah tanpa meningkatkan resiko erosi. Misalnya pohon di sawah dapat memiliki efek besar pada mata pencaharian petani, baik meningkatkan jasa ekosistem yang manfaatnya dapat membantu petani untuk mengatasi laju perubahan iklim sambil memberikan peran mitigasi dengan menyerap karbon dari atmosfer.

Manfaat-manfaat pohon didalam sistem agroforestri inilah yang menyebabkan agroforestri disebut iklim pintar dimana menggabungkan mata pencaharian dan mitigasi sekaligus memiliki peran adaptasi dari laju perubahan iklim. Mengingat ada banyak masyarakat Indonesia yang bergantung dari sektor pertanian dan menimbang mengenai lahan hijau di Indonesia yang cukup luas maka mempertahankan pohon disela-sela lahan pertanian menjadi penting. Selain untuk meningkatkan jasa terhadap lingkungan, pohon juga dapat membantu petani untuk beradaptasi dari drastisnya perubahan iklim yang dapat mempengaruhi hasil panen. Hal inilah yang diharapkan dapat didapatkan dari program LAMA – I. Dimana program ini tidak hanya berfokus pada mitigasi tetapi juga memiliki tujuan sisipan untuk mengentaskan kemiskinan serta melaksanakan pembangunan berbasis sektor lahan yang berkelanjutan.. (World Agroforestry Centre)

3. Kegiatan Program LAMA – I

Kegiatan LAMA – I ini terdiri dari beberapa kegiatan. Sebelum memulai kegiatan ini, LAMA – I dimulai dengan membuat serangkaian aplikasi pembangunan berbasis sektor lahan yang dapat diaplikasikan oleh kabupaten-kabupaten percontohan. Dengan memulai hal ini, diharapkan Kabupaten percontohan tidak mengalami kesulitan dan dapat memulai pembangunan

berbasis sektor lahan yang rendah emisi. Selain untuk memberikan penguatan kapasitas kepada pemerintah daerah, LAMA – I juga memberikan pengarahan mengenai bagaimana LAMA – I diterapkan di daerah masing-masing. Selain, konsultasi publik dan penguatan kapasitas pemerintah daerah, LAMA – I juga memberikan pendampingan selama proyek LAMA – I berlangsung.

Setelah berbagai konsultasi publik di kabupaten masing-masing, lokakarya digelar untuk semua kabupaten di Sumatera Selatan. Hal ini diharapkan kabupaten lain dapat meniru tiga kabupaten percontohan yang telah terlebih dahulu memulai aksi mitigasi di daerahnya. Lokakarya ini juga dimaksudkan untuk mengarusutamakan isu-isu mitigasi serta pembangunan berbasis sektor lahan yang mungkin dilakukan dan telah dicontohkan oleh tiga kabupaten percontohan LAMA – I.

a.) Konsultasi Publik Membangun Strategi Tata Guna Lahan Mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas di Kabupaten Banyuasin

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011, Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), menunjukkan komitmen mengenai pembangunan rendah emisi. Penurunan emisi nasional ditargetkan mencapai 41% pada tahun 2020, dengan rincian 26% dari hasil upaya mandiri dan tambahan 15% dari dukungan internasional. (Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 2011) Untuk mendukung komitmen tersebut, maka dilakukan beberapa bentuk aksi nyata dari berbagai sektor dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk perencanaan mitigasi unilateral yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan penyusunan

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) oleh seluruh provinsi di Indonesia di bawah koordinasi Bappeda tingkat provinsi. Penyusunan RAD-GRK dilakukan dengan mempertimbangan kondisi lokal, mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersama menentukan target dan skenario penurunan emisi, menyusun strategi yang paling efisien dan efektif, serta mengintegrasikan rencana pembangunan ke dalam aksi mitigasi. (Agustina, Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati, 2015)

Proses penyusunan RAD – GRK telah diselesaikan pada akhir tahun 2012 untuk tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan telah disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2012⁵. (Agustina, Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati, 2015) Guna mendukung RAD-GRK dan implementasi Pergub nomor 34 tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Banyuasin turut melakukan peran aktif dalam upaya penurunan emisi terutama untuk sektor berbasis lahan. Salah satu upaya aksi mitigasi pengurangan emisi karbon yang dilakukan adalah melalui proyek Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I).

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas (Selanjutnya Pokja PTGL-EHKB) dibentuk sebagai langkah awal untuk menyusun strategi pembangunan rendah emisi untuk menyelaraskan pembangunan dengan mitigasi perubahan iklim. Strategi tersebut harus mengedepankan perencanaan tata guna lahan, implementasi dan pengawasan, serta evaluasi pembangunan yang tepat dengan melibatkan interaksi berbagai pemangku kepentingan dalam setiap prosesnya. Pokja PTGL-EHKB tengah mengidentifikasi aksi-aksi untuk penurunan emisi gas rumah tersebut. (Agustina, Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati, 2015)

⁵ Pergub no 34 Tahun 2012 mengenai Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Demi mengarusutamakan dan merancang skenario aksi mitigasi sekaligus untuk saling berbagi masukan, dari para pihak pemangku kebijakan di Kabupaten Banyuasin terhadap rencana implementasi aksi penurunan emisi, maka Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Pokja PTGL-EHKB menyelenggarakan konsultasi publik dengan tema “**Membangun Strategi Tata Guna Lahan Mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas Di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan**”, yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Banyuasin. (Agustina, Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati, 2015)

Konsultasi ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk berdiskusi dan memperoleh masukan-masukan yang bersifat strategis dari para pemangku kepentingan. Sehingga nantinya dapat terbentuk kesepahaman dan komitmen bersama yang bermuara pada tercapainya partisipasi dan dukungan semua pihak yang terkait dalam mewujudkan strategi tata guna lahan untuk mendukung ekonomi hijau dan konservasi biodiversitas di Kabupaten Banyuasin. Pada konsultasi publik tersebut juga di lakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan LAMA-I. Penandatanganan program LAMA – I, ini merupakan sebuah bentuk komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dengan program LAMA-I yang menjadi sebuah awal dalam mewujudkan sinergi dan integrasi antara mitigasi perubahan iklim dan rencana pembangunan daerah.

Dr. Suyanto, selaku team leader LAMA-I dari ICRAF menyatakan bahwa 'Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang sangat potensial untuk memperoleh pembelajaran dari inisiatif dan potensi implementasi aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dalam aktivitas pembangunannya. Secara geografis Kabupaten Banyuasin merupakan daerah hilir, sementara Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas merupakan daerah tengah

dan daerah hulu, pada bagian utara daerah aliran Sungai Musi. Sehingga Kabupaten Banyuasin merupakan penerima dampak dari mis-management tata guna lahan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas' (Agustina, Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati, 2015)

Dr. Suyanto menambahkan 'arahan aksi mitigasi Kabupaten Banyuasin, ditujukan untuk mempertahankan tutupan hutan yang tersisa dan melakukan perlindungan terhadap kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta rehabilitasi lahan kritis. Pendekatan pada sektor swasta sebagai bentuk pengelolaan lahan yang terintegrasi juga masuk dalam perencanaan aksi mitigasi. Arahan ini sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. sasaran misi tersebut adalah pengelolaan SDA secara baik dan optimal sehingga SDA tetap lestari dan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Dukungan provinsi dan nasional sangat perlu dilakukan secara harmonis, sehingga RAD dengan sasaran pada level provinsi dapat diterjemahkan implementatif di tingkat kabupaten, begitu juga yang berasal dari tingkat nasional'. (Agustina, Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati, 2015)

Misi besar pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 telah sejalan upaya yang dilakukan LAMA-I di Kabupaten Banyuasin dalam 'pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana'. (Agustina, Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati, 2015) Dukungan dalam aksi mitigasi ini datang dari berbagai pihak terkait seperti dukungan Bupati Banyuasin, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Selanjutnya SKPD) yang tergabung di dalam Pokja TGL-EHB, untuk mencapai sumber daya alam tetap lestari dan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Seperti yang

dicita-citakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Selain untuk menjaga alam tetap lestari, upaya ini dilakukan juga untuk mitigasi atas laju perubahan iklim.

b.) Konsultasi Publik Rencana Aksi Nyata untuk Melestarikan Bumi Musi Banyuasin

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten potensial untuk melaksanakan program LAMA – I seperti kabupaten Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin telah mengidentifikasi rencana aksi mitigasi dalam upaya penurunan emisi oleh Kelompok kerja Perencanaan Tata Guna Lahan Mendukung Ekonomi Hijau dan Konservasi Biodiversitas. Rencana aksi mitigasi ini kemudian dipaparkan dihadapan para pemangku kepentingan dan *stakeholder* terkait lainnya pada konsultasi publik yang di selenggarakan pada tanggal 30 April 2015. Konsultasi publik yang dilaksanakan di Hotel Ranggonang Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin ini ditujukan untuk mendapatkan masukan, sekaligus membangun kesamaan pandangan dari berbagai pihak terhadap rencana implementasi aksi penurunan emisi yang telah disusun Pokja Kabupaten Musi Banyuasin. (Agustina, Rencana Aksi Nyata untuk Lestarkan Bumi Musi Banyuasin, 2015)

Konsultasi publik ini juga dapat menjadi kesempatan untuk berdiskusi dengan partisipasi aktif dalam mewujudkan strategi tata guna lahan untuk mendukung ekonomi hijau dan konservasi biodiversitas di Kabupaten Musi Banyuasin. Aksi mitigasi ini berfokus pada dua kegiatan utama yaitu kegiatan untuk mempertahankan tutupan lahan yang dapat mencegah penurunan cadangan karbon dan kegiatan meningkatkan tutupan lahan yang dapat meningkatkan cadangan karbon didalam tanah. Rencana aksi mitigasi yang telah di susun oleh Pokja Kabupaten Musi Banyuasin di maksudkan untuk mempengaruhi tata guna lahan di Kabupaten Musi Banyuasin untuk mempertahankan fungsi lingkungan, fungsi air, dan fungsi keanekaragaman

hayati, dengan tetap mempertimbangkan proses pembangunan yang membutuhkan perubahan penggunaan lahan, sehingga pembangunan yang terencana dan sesuai dengan fungsinya berdasarkan unit perencanaan dapat terlaksana.

Penyusunan strategi pembangunan rendah emisi ini dilakukan untuk menyelaraskan pembangunan dengan mitigasi perubahan iklim. Strategi tersebut harus mengedepankan perencanaan tata guna lahan, implementasi dan pengawasan, serta evaluasi pembangunan yang tepat dengan melibatkan interaksi berbagai pemangku kepentingan dalam setiap prosesnya. Strategi pembangunan rendah ini juga sebagai langkah awal Kabupaten Banyuasin dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan implementasi Pergub nomor 34 tahun 2012. (Agustina, Rencana Aksi Nyata untuk Lestarkan Bumi Musi Banyuasin, 2015)

Bonie Fajar Dewantara dari World Agroforestry Center (ICRAF) selaku Koordinator program LAMA-I Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa 'dari ke-tiga kabupaten sebagai pilot project LAMA-I, Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten yang sangat potensial untuk memperoleh pembelajaran dari inisiatif dan potensi implementasi aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan, pertambangan, dan pertanian. Kompleksitas pengembangan kawasan yang relatif datar 20 -150 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tantangan yang cukup besar. Tantangan datang dari pengembangan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman akasia yang berkembang cukup pesat sejak tahun 1990 terhadap laju kehilangan tutupan hutan termasuk dalam kawasan gambut dapat menjadi sasaran aksi mitigasi mendukung pembangunan rendah emisi'. (Agustina, Rencana Aksi Nyata untuk Lestarkan Bumi Musi Banyuasin, 2015)

Misi besar pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 dirasa sejalan dengan upaya yang dilakukan LAMA-I di Kabupaten Musi Banyuasin dalam 'pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana'. Dukungan penting dalam proses pelaksanaan program ini cukup besar datang dari berbagai pihak terkait seperti dukungan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Bappeda dan SKPD yang tergabung di dalam Pokja Kabupaten Musi Banyuasin, untuk mencapai Permata MUSI BANYUASIN 2017⁶.

Pada konsultasi publik tersebut juga di lakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan LAMA-I. Penandatanganan kerjasama ini merupakan sebuah bentuk komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dengan program LAMA-I yang menjadi sebuah awal dalam mewujudkan sinergi dan integrasi antara mitigasi perubahan iklim dan rencana pembangunan daerah. (Agustina, Rencana Aksi Nyata untuk Lestarkan Bumi Musi Banyuasin, 2015)

c.) Konsultasi Publik Membangun Strategi Perencanaan Tata Guna Lahan Untuk Mendukung Pembangunan Rendah Emisi di Kabupaten Musi Rawas

Emisi gas rumah kaca di Kabupaten Musi Rawas berpotensi diturunkan melalui aksi mitigasi yang telah diidentifikasi oleh kelompok kerja (Selanjutnya Pokja) Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (Selanjutnya REDD)+. Pokja ini memiliki tugas untuk mendukung upaya penurunan emisi dengan melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Pokja REDD+ kabupaten Musi Rawas mengidentifikasi skenario penurunan emisi yang kiranya dapat diterapkan. Konsultasi publik ini digelar pada tanggal 6 Mei 2015 di

⁶ Visi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2017 yaitu penguatan ekonomi kerakyatan, religius, mandiri, adil, terdepan dan maju bersama ditahun 2017 (Permata Musi Banyuasin 2017)

hotel Hakmaz Taba Lubuk Linggau. (Agustina, Aksi Mitigasi Berpotensi Menurunkan Emisi di Kabupaten Musi Rawas, 2015)

Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah hulu yang sangat berperan dalam pengaturan tata air pada daerah aliran sungai yang mengarah ke Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Ini berarti kabupaten Musi Rawas memiliki peran untuk melindungi daerah hilir seperti Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin dari bencana yang diakibatkan tata air. Arah aksi mitigasi Kabupaten Musi Rawas, ditujukan untuk mempertahankan tutupan hutan pada ketinggian di daerah Bukit Barisan seperti kawasan hutan dalam dan sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan melakukan perlindungan terhadap kawasan lindung serta rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan tata guna lahan berkelanjutan pada kawasan hutan, perkebunan dan areal pertambangan. (Agustina, Aksi Mitigasi Berpotensi Menurunkan Emisi di Kabupaten Musi Rawas, 2015)

Manfaat dari aksi mitigasi ini tidak hanya berguna bagi pengurangan karbon tetapi juga menjaga keberlangsungan jasa lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas seperti mempertahankan daerah aliran sungai, mempertahankan keanekaragaman hayati, mencegah bencana banjir atau tanah longsor yang masfaatnya dapat langsung dirasakan. Aksi ini juga membantu terwujudnya pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Rawas.

Harapan utama dari strategi pelaksanaan tata guna lahan ini adalah pengatusutamaan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai bagian dari strategi pelaksanaan tata guna lahan untuk pembangunan rendah emisi dan pembangunan berkelanjutan. Disaat yang sama pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus berjalan disertai dengan adanya kesadaran untuk mempertahankan sumberdaya alam agar

tetap lestari sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai pada jangka pendek dan juga dapat dirasakan hingga masa yang akan datang. (Agustina, Aksi Mitigasi Berpotensi Menurunkan Emisi di Kabupaten Musi Rawas, 2015)

Pada konsultasi publik tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan LAMA – I. Penandatanganan kerjasama ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi dan integrasi antara mitigasi perubahan iklim dan rencana pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan program LAMA – I. (Agustina, Aksi Mitigasi Berpotensi Menurunkan Emisi di Kabupaten Musi Rawas, 2015) Kedepannya, diharapkan tidak ada lagi tutupan luas hutan yang berkurang, sehingga aksi mitigasi ini mencapai tujuannya.

d.) Lokakarya Pembelajaran Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten di tingkat
Provinsi Sumatera Selatan

Lokakarya ini digelar oleh LAMA – I yang digiatkan oleh World Agroforestry Centre (ICRAF) di hotel Aryaduta Palembang, pada hari Selasa, 16 Juni 2015. Lokakarya ini bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari tiga kabupaten Lokasi LAMA-I di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Diharapkan pembelajaran ini dapat ditiru oleh kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi Program LAMA-I di tiga kabupaten Provinsi Sumatera Selatan telah membuahkan hasil Dokumen Skenario Tata Guna Lahan untuk mendukung pembangunan rendah emisi pada kabupaten tersebut. Tiga skenario aksi mitigasi ini telah melalui proses konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan yang terkait di sektor berbasis lahan. (Agustina, Merangkai Inspirasi Pembangunan Hijau di Bumi Sriwijaya, 2015)

Penyusunan strategi tata guna lahan merupakan inisiatif daerah sebagai upaya mendukung Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011, mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK dilatar belakangi oleh komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi nasional sebesar 41% pada tahun 2020, dengan target 26% dilakukan dengan upaya mandiri dan 15% berasal dari bantuan Internasional. Komitmen penurunan emisi ini harus dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, oleh karena itu prinsip pembangunan hijau menjadi prinsip yang perlu di adopsi untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. (Agustina, Merangkai Inspirasi Pembangunan Hijau di Bumi Sriwijaya, 2015)

Perencanaan mitigasi secara nasional dirancang oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dikoordinasikan di tingkat provinsi oleh Bappeda, dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Dalam upaya untuk membangun kapasitas pemerintah daerah tingkat kabupaten selaku pelaksana kegiatan RAD-GRK, LAMA-I telah dan sedang melakukan serangkaian kegiatan yang memperkuat kapasitas personal dan kelembagaan sekaligus mengembangkan perangkat (LUWES-LUMENS)⁷ untuk merencanakan pembangunan rendah emisi sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor lahan. (Agustina, Merangkai Inspirasi Pembangunan Hijau di Bumi Sriwijaya, 2015)

Upaya yang telah dilakukan oleh Program LAMA-I bersama kelompok kerja (Pokja) di tingkat kabupaten telah sejalan dengan Misi Besar Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 yaitu "Pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana" menuju "SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL".

⁷ Luwes adalah *Land-use planning for low-emission development strategies* yang disusun oleh ICRAF untuk diaplikasikan oleh Kabupaten terpilih dalam proyek LAMA – I. LUMENS adalah *Land-use Planning for Development with Multiple Environmental Services*, perangkat revisi dari LUWES yang telah disesuaikan dengan masing-masing kabupaten.

Penyusunan dokumen RAD-GRK tingkat Provinsi di Sumatera Selatan juga telah diselesaikan pada akhir tahun 2012 dan telah disahkan dalam bentuk Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2012. Namun demikian, aksi mitigasi yang sudah dibuat tersebut masih perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan dan tahap implementasi di tingkat kabupaten. (Agustina, Merangkai Inspirasi Pembangunan Hijau di Bumi Sriwijaya, 2015)

Proses mengarusutamakan skenario aksi mitigasi ke dalam rencana Pembangunan kabupaten ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sektor berbasis lahan, sehingga implementasi skenario aksi mitigasi dapat terwujud. Dukungan para pengambil kebijakan ini juga akan meningkatkan potensi replikasi di kabupaten lain yang akan berkontribusi terhadap penurunan emisi secara nasional.

Tiga Kabupaten yang menjadi percontohan program LAMA – I telah memiliki rencana penurunan emisi masing-masing. Kabupaten Musi Banyuasin telah menyiapkan Rencana aksi mitigasi yang diantaranya adalah pengkayaan tanaman sawit dengan tanaman pohon lainnya menjadi kebun sawit campur dan menghijaukan lahan yang terdegradasi. Kabupaten Musi Banyuasin berusaha mengimplementasikan rencana untuk mempertahankan tutupan hutan rawa di area yang bergambut dan mengaplikasikan sistem agroforestri pohon karet di lahan-lahan yang belum dimanfaatkan. Kabupaten Musi Rawas siap untuk mengaplikasikan agroforestri di kebun masyarakat dan menyisipkan tanaman kehutanan di Kebun sawit. (Agustina, Merangkai Inspirasi Pembangunan Hijau di Bumi Sriwijaya, 2015) Diharapkan dengan adanya rencana aksi mitigasi yang dilakukan tiga Kabupaten percontohan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten lain di Sumatera Selatan untuk melaksanakan aksi mitigasi serupa untuk ikut berkontribusi menurunkan emisi ditingkat nasional.

TABEL 1.3
PROGRAM WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF) DAN MITRA KERJA DI
SUMATERA SELATAN

PROGRAM – PROGRAM WORLD AGROFORESTRY CENTRE (ICRAF) DI SUMATERA SELATAN	
PROGRAM LAMA – I (PENGINISIASI)  World Agroforestry Centre	MITRA  DANIDA Danish International Development Agency   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  Kementerian PPN/ Bappenas 
PROGRAM GREEN GROWTH PLAN  World Agroforestry Centre	MITRA   KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN